



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN 2014 s.d. 2019**

**NOMOR : 050/Renstra-P/2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018**

Komplek Perkantoran Pemkab. Pidie Jaya Cot Trieng
Telp./Fax. (0653) 51416 Kode Pos 24186 Kecamatan Meureudu
e-mail: bappedapijay@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat Rahmat Allah SWT kami telah dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 s.d 2019. Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Bappeda selama periode 5 (Lima) tahun untuk menjabarkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMK Pidie Jaya tahun 2014 s.d 2019 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Pidie Jaya Tahun 2014 - 2019.

Renstra juga menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja tahunan atau Renja Bappeda yang lebih terukur dan konsisten setiap tahunnya hingga akhirnya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK). Selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diteruskan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah pengesahan oleh DPRK yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Pelaksanaan program dan kegiatan yang menganut prinsip anggaran berbasis kinerja menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA tersebut.

Kami menyadari bahwa penulisan dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 s.d 2019 ini, masih memerlukan berbagai masukan dalam upaya penyempurnaan substansi dari dokumen ini secara komprehensif dan diharapkan dokumen tersebut dapat dijadikan acuan penyusunan perencanaan lanjutan lainnya.

Meureudu, 19 November 2018
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PIDIE JAYA

MUNAWAR IBRAHIM, S.Kp. MPH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670509 198902 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penyusunan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumberdaya Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.....	II-13
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.....	II-15
2.4 Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.....	II-20
2.5 Kondisi yang Diharapkan.....	II-20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Pidie Jaya.....	III-2
3.3 Penentuan Isu Strategis.....	III-5
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	V-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VI-1
BAB VIII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar dan Kondisi Barang Milik Bappeda Kab. Pidie Jaya	II-14
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Pidie Jaya	II-17
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kab. Pidie Jaya.....	II-19
Tabel 3.1 Keterkaitan Tugas dan Fungsi Bappeda dan Visi dan Misi Bupati Pidie Jaya	III-3
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kab. Pidie Jaya 2014 s.d 2019.....	IV-5
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-1
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Kab. Pidie Jaya	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMK Pidie Jaya 2014 s.d 2019.....	VII-2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gbr 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.....	II-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 480 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan perubahan terhadap RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula Perubahan terhadap Renstra BAPPEDA Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019.

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dalam rangka menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Perubahan Renstra yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan

maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Perubahan Renstra Bappeda merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Perubahan Renstra Bappeda yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola Bappeda sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja (Renja) Bappeda sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019 (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah:

1. Sebagai acuan dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan secara terpadu, terukur, terarah, sinergis, dan berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2014-2019 dapat tercapai;
2. Sebagai pedoman dalam memahami dan menilai arah, kebijakan, program serta kegiatan tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
3. Sebagai media informasi dalam bidang perencanaan dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah:

1. Sebagai alat/media dalam mengimplementasikan program-program RPJMD Pidie Jaya Tahun 2014-2019 dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Bappeda sehingga perencanaan dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu, dan tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur OPD, sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan OPD.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan OPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi Aceh serta telaahan RTRW dan KLHS.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, pada bagian ini dikemukakan rumusan dan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- BAB VII : KINERJA PENDANAAN BIDANG URUSAN, menguraikan tentang indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pidie Jaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan turunan dari Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya. pada Pasal 5 menjelaskan bahwa Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dengan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, perencanaan pembangunan keistimewaan dan SDM, perencanaan sarana dan prasarana, penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana dan sosial budaya;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
- f. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

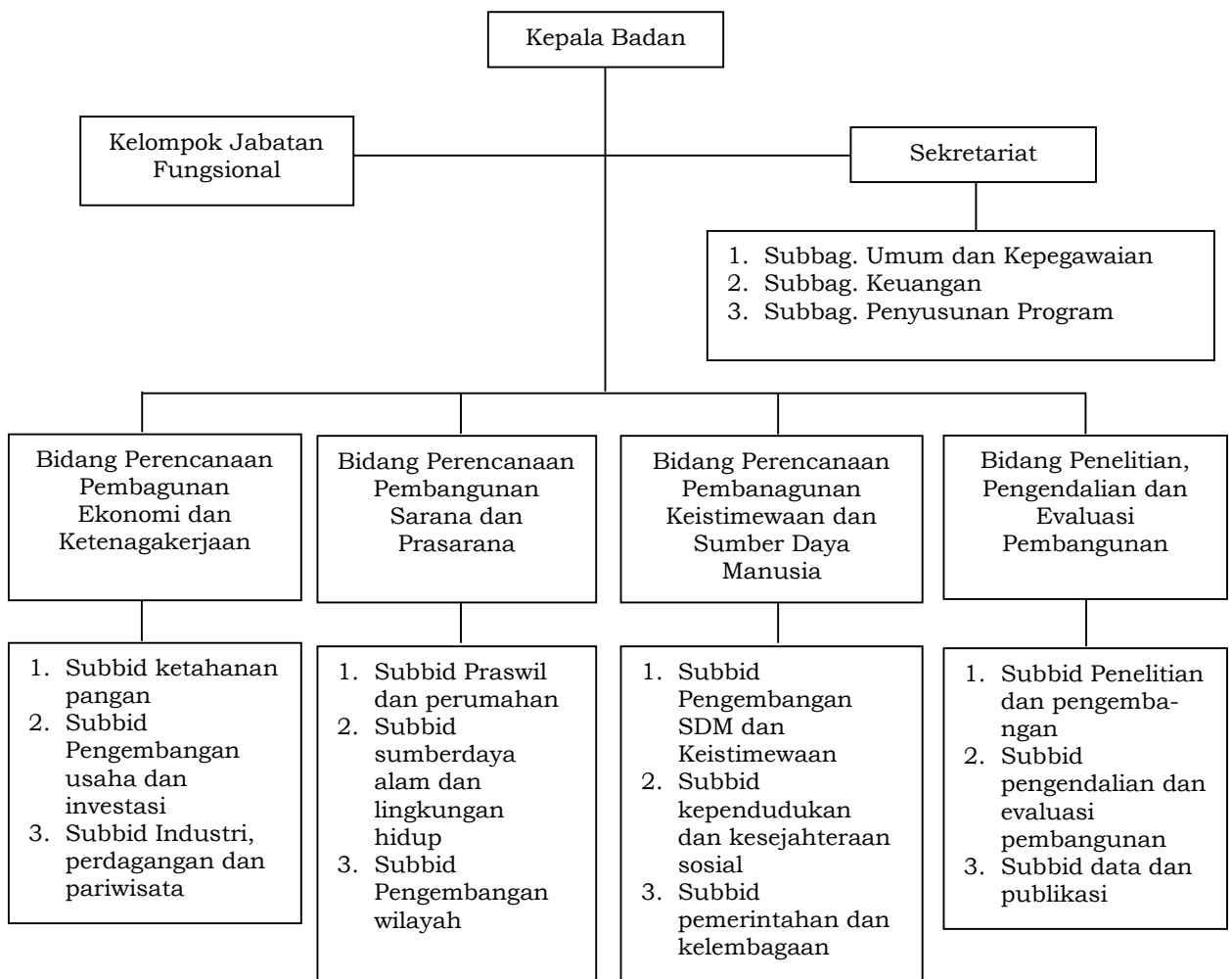
Dalam penyelenggaraan fungsinya Bappeda memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK);
- b. Melakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK);

- c. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK);
- d. Melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
- e. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Kabupaten (RKPK), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten;
- f. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) melalui tim anggaran;
- g. Meneliti dan mengevaluasi RKA-SKPK untuk bahan penyusunan RAPBK melalui tim anggaran;
- h. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPK.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KAB. PIDIE JAYA



Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur organisasi adalah sebagai berikut:

A. KEPALA BAPPEDA

Tugas Pokok : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan dan SDM, penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pembangunan kabupaten;
- d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana, prasarana, keistimewaan dan SDM;
- e. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, Bantuan, Pinjaman, atau Hibah Luar Negeri;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, Bantuan, Pinjaman, atau Hibah Luar Negeri
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPK dan

atau lembaga terkait lainnya dibidang perencanaan pembangunan daerah;

- i. Pembinaan UPTB; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Tugas Pokok : melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan Bappeda.

Fungsi : a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;

c. pengelolaan administrasi keuangan;

d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;

f. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, dan rencana kinerja Kepala Bappeda; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1 Sub Bagian Penyusunan Program

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan program kerja

tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD dan rencana kerja tahunan

B.2 Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok : melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

B.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat.

C. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Tugas Pokok : melakukan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan pengembangan usaha dan investasi, ketahanan pangan dan industri, perdagangan dan pariwisata.

Fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan ekonomi dan Ketenagakerjaan.;
b. penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
c. perumusan kebijakan teknis perencanaan

- dan pengendalian pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan;
- d. pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah (lintas program) bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - f. pelaksanaan identifikasi potensi sumber daya alam, sebagai basis pengembangan dan perkuatan ekonomi daerah (kerakyatan) untuk penyusunan program pembangunan daerah bidang perekonomian dan ketenagakerjaan;
 - g. pewujudan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi daerah;
 - h. penyiapan konsepsi kebijakan ekonomi mikro dan analisis indikator ekonomi daerah;
 - i. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan ekonomi regional;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan perekonomian dan ketenagakerjaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 Sub Bidang Ketahanan Pangan

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang urusan ketahanan pangan.

C.2 Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata.

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang urusan investasi, pendapatan daerah, pembiayaan pembangunan, pengelolaan asset daerah, kebijakan ekonomi regional, ketenagakerjaan, mobilitas penduduk.

C.3 Sub Bidang Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan.

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang industri, perdagangan, dan pariwisata

D. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

Tugas Pokok : melakukan koordinasi perencanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan perencanaan Pembangunan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi,

- sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
- c. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
 - d. pelaksanaan koordinasi kerjasama pembangunan antar kabupaten/kota dan antar propinsi;
 - e. pelaksanaan analisis permasalahan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya

D.1 Sub Bidang Praswil dan Perumahan.

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sarana, prasarana wilayah, pekerjaan umum dan perumahan.

D.2 Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sumberdaya alam, mineral, energi, lingkungan hidup, pengairan, pertanahan.

D.3 Sub Bidang pengembangan wilayah

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang pengembangan wilayah.

E. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas Pokok : melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Fungsi : a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial dan kelembagaan meliputi agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan di bidang agama, sumber daya manusia, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum,

- kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
 - d. pengembangan analisis dan kebijaksanaan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
 - e. pelaksanaan analisis permasalahan sumber daya manusia, sosial dan kelembagaan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan

- perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 Sub Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan fungsi penunjang di bidang pendidikan, kesehatan, pendidikan dayah, syariat islam, pemuda dan olahraga, Satpol PP dan WH, MAA, MPD, MPU dan Baitul Mal.

E.2 Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan fungsi penunjang di bidang sosial, catatan sipil dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kb dan kesejahteraan sosial.

E.3 Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan fungsi penunjang di bidang kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan arsip, kesatuan bangsa dan politik, korpri, keuangan inspektorat, sekretariat DPRK bagian pemerintahan, bagian umum, bagian humas, bagian hukum, bagian pembangunan setdakab dan kecamatan.

F. BIDANG PENELITIAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Tugas Pokok : melakukan penelitian dan koordinasi pembangunan penelitian, pengembangan dan program pembangunan dalam melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan lingkup bidang penelitian, pengembangan dan program pembangunan serta pengembangan data, pengendalian dan evaluasi pembangunan pembangunan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan kegiatan pembangunan daerah; pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. pelaksanaan penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan di daerah;
- c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pembangunan daerah;
- d. penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya

F.1 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tugas Pokok : melakukan pelaksanaan penelitian, fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan daerah

F.2 Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Tugas Pokok : melakukan penyiapan data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi pembangunan.

F.3 Sub Bidang Data dan Publikasi

Tugas Pokok : pengumpulan data dan analisa pembangunan daerah pengelolaan data pembangunan, laporan kinerja pemerintah daerah, laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan dan publikasi.

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Pidie Jaya

1. Sumber Daya Manusia

Informasi jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin:
 - a.1 Pegawai Negeri Sipil
 - Laki-laki : 16 Orang
 - Perempuan : 10 Orang
 - a.2 Pegawai Harian Lepas
 - Laki-laki : 28 Orang
 - Perempuan : 19 Orang
- b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:
 - Eselon II : 1 Orang
 - Eselon III : 5 Orang
 - Eselon IV : 14 Orang
- c. Jumlah PNS berdasarkan pendidikan:
 - S2 : 5 Orang
 - S1 : 21 Orang

2. Aset dan Modal

Sarana dan prasarana (Barang Aset) perkantoran yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar dan Kondisi Barang Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Th. 2018

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	Gedung Kantor	1	1	0
2	Kendaraan Roda 4	2	2	0
3	Kederaan Roda 2	15	14	1
4	Mesin Ketik	2	1	1
5	lemari kayu tempahan	19	15	4
6	Lemari Besi	8	8	0
7	Filing Kabinet	8	8	0
8	Kursi Futura / Aula	294	95	199
9	Kursi Putar	32	15	17
10	Meja Kerja 1 Biro	4	2	2
11	Meja Kerja ½ Biro	35	25	10
12	Meja Rapat	4	1	3
13	Meja Rapat/Aula	50	20	30
14	Lemari Es	1	1	0
15	AC	8	8	0
16	Komputer PC	16	5	11
17	Laptop/notebook	34	26	8
18	Kamera digital	20	8	12
19	Handy Camp	4	2	2
20	Facsimili	1	1	0
21	Televisi	7	6	1
22	White Board	3	2	1
23	Proyektor	7	5	2
24	GPS	10	7	3
25	Mesin Foto Copy	2	2	0
26	Mesin Penjilid Besar/Max	2	1	1
27	Pesawat Telp./Fax	1	0	1
28	Printer	30	20	10
29	Plotter	1	1	0
30	Scanner	1	0	1
31	Mesin Pompa Air	2	1	1
32	Server	5	3	2
33	Lemari Rak Piring	1	1	0
34	Meja Podieum Besar	1	0	1
35	Podium Single	1	1	0
36	Sound Sistem / Set	1	0	1
37	Layar LCD Proyektor	2	2	0
38	Wireless TOA	1	0	1
39	UPS	15	3	12
40	Dispenser	4	3	1
41	Lapangan Tennis Meja / Set	1	1	0
42	Mesin Potong Rumput	2	1	1

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak
43	Teodolit (<i>kaki tiga</i>)	1	1	0
44	Auto Level	1	1	0
45	Kompas	2	2	0
46	Meteran Roda	1	1	0
47	Handdy Talk	3	0	3
48	Parabola	2	0	2
49	Kursi Tamu	2	2	0
50	kursi rapat	10	10	0
51	Stabilizer	1	1	0
52	gorden	2	1	1
53	harddrive	12	6	6
54	kursi kerja pimpinan	1	0	1
55	audio recorder	1	1	0
56	lemari arsip	2	2	0
57	tablet	1	1	0
58	memori (Ram server)	2	2	0
59	Telpon PABX	1	1	0
60	CCTV	1	1	0
61	Tangga aluminium	2	2	0
62	router	4	4	0

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Pidie Jaya

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, kinerja yang dicapai oleh Bappeda Kabupaten Pidie Jaya selama 2014 s.d 2018 adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja urusan penataan ruang:

- Tersusunnya Master Plan Kawasan Pusat Perkantoran Cot Trieng – Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
- Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya.

b. Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan:

- Tersusunnya Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Pidie Jaya Tahun 2015-2035
- Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019.
- Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT).

- Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
- Tersusunnya dokumen RKPK Pidie Jaya tahunan.
- Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS tahunan.
- Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan tahunan.
- Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah tahunan.
- Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Pidie Jaya tahunan.
- Terlaksananya kegiatan koordinasi lintas bidang, lintas sektor, lintas daerah, provinsi dan pusat.
- Tersusunnya dokumen Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dan Air Minum (AMPL) Pidie Jaya.
- Tersusunnya dokumen pedataan kemiskinan pedesaan Kabupaten Pidie Jaya.

c. *Capaian kinerja urusan statistik:*

- Tersusunnya buku Indikator Pembangunan Daerah (PDRB) Kabupaten Pidie Jaya tahunan.
- Tersusunnya buku potensi desa Kabupaten Pidie Jaya.
- Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya tahunan.
- Tersusunnya Buku Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pidie Jaya tahunan.
- Tersusunnya buku Pidie Jaya Dalam Angka tahunan.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target IKK	Target lainnya	Satuan	Target Renstra Bappeda/Tahun					Realisasi Capaian Renstra Bappeda/Tahun					Rasio Capaian Renstra Bappeda/Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	I. Indikator Kinerja Daerah																		
1	Persentase ketersediaan dokumen LAKIP	100%		%	100	100	100	100	100	50	100	100	100	100	50	100	100	100	100
2	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	100%		%	100	100	100	100	100	90	90	90	90	100	90	90	90	90	100
3	Proses perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi E-Planning	100%		%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
4	Jumlah Dokumen data dan informasi Pembangunan daerah yang tersedia	100%		Dok	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
5	Pertumbuhan PDRB per tahun / Pertumbuhan Ekonomi	100%		%	3,47	4,02	4,87	3,71	4,11	4,55	3,63	4,84	3,7	5,8	131,12	90,30	99,38	99,73	141,12
6	PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (jutaan)	18,35		Rp.	14,7	14,7	14,7	14,7	18,1	14	14,3	14,7	14,9	15,5	95,77	97,41	99,93	101,63	85,17
7	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	10%		%	23,10	23,10	23,10	22,05	21,00	22,70	21,78	21,40	21,18	21,82	101,76	106,06	107,94	104,11	96,24
	II. Indikator Kinerja Program																		
1	Tingkat kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan RTRW		100%	%	50	55	60	70	80	50	55	60	65	80	100	100	100	93	100

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 - 2019

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target IKK	Target lainnya	Satuan	Target Renstra Bappeda/Tahun					Realisasi Capaian Renstra Bappeda/Tahun					Rasio Capaian Renstra Bappeda/Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah		100%	%	60	65	70	75	80	60	65	70	75	80	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya integrasi pembangunan antar sektor		100%	%	60	65	70	75	80	60	65	70	75	80	100	100	100	100	100
4	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Diklat Perencanaan		100%	%	7	7	7	7	10	5	6	7	7	10	71	86	100	100	100
5	Prosentase kelembagaan P3A yang dibina dan penguatan Kelembagaan KPI		100%	%	85	88	90	92	93	85	88	90	92	93	100	100	100	100	100
6	Prosentase penguatan kelembagaan sanitasi dan air minum (PPSP/AMPL)		100%	%	85	88	90	92	93	85	88	90	92	93	100	100	100	100	100
7	Prosentase Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah		100%	%	90	90	97	98	100	90	90	97	98	100	100	100	100	100	100
8	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan ekonomi		100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan KSDM		100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan Sarana dan Prasarana		100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kab. Pidie Jaya (dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah Anggaran (dalam Juta Rupiah)/(Tahun)					Realisasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)/(Tahun)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%) / (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (dalam Juta Rupiah)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	4.771	7.601	7.604	11.501	11.646	4.771	7.271	7.352	10.910	10.601	100	96	97	95	91	9.588	9.034
Belanja tidak langsung	1.723	1.852	2.312	2.360	2.737	1.723	1.832	2.176	1.984	1.863	100	99	94	84	68	2.315	1.964
- Belanja Pegawai	1.723	1.852	2.312	2.360	2.737	1.723	1.832	2.176	1.984	1.863	100	99	94	84	68	2.315	1.964
Belanja langsung	3.048	5.749	5.293	9.141	8.909	3.048	5.439	5.176	8.926	8.738	100	95	98	98	98	7.273	7.070
- Belanja Pegawai	-	1.065	761	1.286	1.300	-	1.021	754	1.271	1.287	-	96	99	99	99	1.103	1.083
- Belanja Barang dan Jasa	-	4.445	4.013	7.446	5.130	-	4.192	3.905	7.255	5.011	-	94	97	97	98	5.259	5.091
- Belanja Modal	-	239	519	409	2.479	-	226	517	400	2.440	-	95	100	98	98	911	896

2.4. Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya

Tantangan:

1. Belum terciptanya sistem perencanaan daerah yang terpadu sesuai dengan SOP.
2. Perubahan kebijakan pembangunan pusat dan provinsi yang cepat menuntut perencanaan yang lebih fleksibel dan terarah.
3. Belum berjalannya sistem monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
4. Belum tersedianya data dan informasi yang akurat serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

Peluang:

1. Tersedianya dokumen RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 sebagai acuan pelayanan dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan pendukungnya.
3. Meningkatnya semangat kerja pegawai Bappeda dan terjalinnya koordinasi antar bidang perencanaan, antar sektor, dan SKPK.
4. Adanya dukungan pendanaan bidang perencanaan dalam rangka peningkatan pelayanan, koordinasi, dan monitoring yang lebih baik dan inten.

2.5. Kondisi Yang Di Harapkan

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, diharapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dapat menjadi lembaga yang responsif, kreatif, dan inovatif sebagai motor penggerak pembangunan daerah dalam menjawab perubahan zaman dan menghadapi tantangan ke depan.

Secara umum kondisi yang diupayakan hendak dicapai pada tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, meliputi:

- Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan studi/kajian dan penelitian bidang sarana dan prasarana, ekonomi serta Keistimewaan dan SDM.
 - Peningkatan kualitas data dan informasi dalam proses penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
2. Peningkatan kapasitas/kemampuan aparatur perencanaan, meliputi:
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai teknis bidang perencanaan ekonomi, sarana dan prasarana, Keistimewaan dan SDM, serta bidang Evaluasi Pembangunan Bappeda melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan yang terarah.
 - Penempatan PNS sesuai kompetensi dan latar belakang pendidikan formal dengan bidang tugasnya masing-masing.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung aktivitas perkantoran, meliputi:
- Meningkatkan fungsi dan fasilitas perkantoran seperti tersediannya ruang yang cukup untuk kerja dan rapat-rapat, serta tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dalam rangka kegiatan perencanaan dan optimalisasi pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019 yang mana memuat tentang penataan birokrasi pemerintahan yang efektif sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun. Selama ini isu yang paling mengemuka dikalangan masyarakat adalah lemahnya sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Masyarakat menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik sejalan dengan peningkatan pengetahuan dan informasi yang diperoleh oleh masyarakat, disamping pengaruh globalisasi yang semakin tak terbendung.

Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai lagi bagi tatanan kehidupan masyarakat dan semangat reformasi, saat ini telah berubah dengan pesat dan cepat. Oleh karena itu perubahan tersebut dinilai sangat wajar dan sudah seharusnya pemerintah merespon dengan melakukan perubahan yang terarah guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Rencana strategis (Renstra) yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik seperti tuntutan masyarakat. Renstra Bappeda Kabupaten Pidie Jaya telah mempertimbangkan beberapa faktor. Pada tahap awal dilakukan analisis terhadap lingkup pengendalian yang sangat berpengaruh baik dari faktor internal atau eksternal. Identifikasi dilakukan terhadap kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada.

Dari indentifikasi terhadap lingkup pengendalian yang ada, maka dirumuskan isu strategis bagi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan.

Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi kepada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhatikan potensi dan sumberdaya yang

dimiliki bappeda, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada. Disamping itu juga mempertimbangkan indentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Pidie Jaya

Dalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019 telah menyebutkan Visi dan Misi serta Program Pembangunan Bupati terpilih selama 5 (lima) tahun yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA”* dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu.
5. Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.

Untuk menjawab visi dan misi tersebut maka Bupati Pidie Jaya menetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan dalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019 diantaranya adalah:

1. Penataan Birokrasi Pemerintahan;
2. Pelaksanaan Syariat Islam;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Daerah/Alam;
7. Infrastruktur Pendukung yang Terintegrasi;
8. Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial; dan
9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

Lebih rinci tentang keterkaitan tugas antara tugas dan fungsi Bappeda dan Visi dan Misi Bupati dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Bappeda dan Visi dan Misi Bupati Pidie Jaya

Visi : *“Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA”*

Tugas Bappeda	Fungsi Bappeda	Misi Bupati	Perioritas Pembangunan Daerah	Bidang Tugas Bappeda	Fungsi Bidang Bappeda
	1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.	1. Penataan Birokrasi Pemerintahan	1. Sekretariat 2. P2EK 3. P2SP 4. P2KSDM 5. P2EP	1. Menjalankan urusan ketatausahaan Bappeda yang dimotori oleh bidang Sekretariat serta didukung oleh bidang perencanaan guna Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.
1. Menyusun kebijakan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah	2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang	2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Daerah/Alam	1. Sekretariat 2. P2EK 3. P2SP 4. P2KSDM	1. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang ekonomi & ketenagakerjaan, infrastruktur, keistimewaan dan sosial budaya.
	3. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah	3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.	4. Pendidikan 5. Kesehatan	1. Sekretariat 2. P2KSDM 3. P2EP	2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah
	4. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya	4. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu.	6. Infrastruktur Pendukung yang Terintegrasi 7. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.	1. Sekretariat 2. P2EK 3. P2SP 4. P2EP	3. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya
	5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan didaerah yang bersumber dari APBK dan APBN	5. Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam	8. Pelaksanaan Syariat Islam 9. Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial	1. Sekretariat 2. P2KSDM 3. P2EP	4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan didaerah yang bersumber dari APBK dan APBN
	6. Penyiapan bahan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah				5. Penyiapan bahan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

3.2.1. Identifikasi Faktor Internal

Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya yang dipandang dapat mendukung maupun berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Faktor internal yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi:

1. Bappeda merupakan OPD yang secara aturan tercantum dalam Undang-Undang, sehingga memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
2. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Bappeda untuk dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakukan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.

Faktor internal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi:

1. Lemahnya kapasitas kelembagaan Bappeda sebagai instansi yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.
2. Belum adanya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang terperinci untuk Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menganalisis sebuah kegiatan secara layak dan kredibel.
3. Belum meratanya kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana di Bappeda, serta kurangnya kaderisasi terhadap PNS dalam pemahaman perencanaan daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
5. Kurangnya tenaga pendukung baik PNS ataupun tenaga THL yang memiliki kemampuan khusus guna membantu kegiatan perencanaan Bappeda.
6. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Bappeda baik dari segi kualitas dan kuantitas.

3.2.2. Identifikasi Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya yang dipandang dapat mendukung maupun berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Faktor eksternal yang dianggap mampu mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi, adalah:

1. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang dianggap dapat mendukung kegiatan perencanaan daerah.
2. Ketersediaan perguruan tinggi, LSM, BPS dan lembaga lainnya untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam perencanaan pembangunan daerah.

Faktor eksternal yang dianggap menghambat upaya pencapaian tujuan organisasi, adalah:

1. Kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.
2. Tingginya ego sektoral antar SKPK menyebabkan fungsi koordinasi yang dibangun tidak berjalan sesuai harapan.
3. Lemahnya komitmen Pimpinan Daerah, SKPK terhadap produk-produk perencanaan yang telah disepakati bersama.
4. Kurangnya keyakinan masyarakat terhadap realisasi pembangunan dari sebuah perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
5. Masih terhdapat tumpang tindihnya perencanaan yang dilakukan oleh Badan/Dinas/Kantor khususnya dalam penentuan program dan kegiatan.

3.3. Penentuan Isu Strategis

Dari hasil indentifikasi faktor lingkungan strategis tersebut diketahui faktor lingkungan yang dominan dan potensial, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, yang selanjutnya dirumuskan menjadi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Bappeda dalam bidang perencanaan daerah.
2. Tidak konsistennya perencanaan pembangunan daerah.

3. Lemahnya koordinasi perencanaan akibat lemahnya kapasitas kelembagaan Bappeda.
4. Lemahnya pemahaman Pimpinan Daerah, SKPK, DPRK terhadap pentingnya dokumen perencanaan pembangunan.
5. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dalam proses perencanaan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Pidie Jaya mengacu pada Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 yaitu Mewujudkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa. Sedangkan sasarannya adalah Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. ditetapkan sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

Indikator tujuan yang digunakan yaitu Prosentase Kualitas kinerja Aparatur yang memiliki kompetensi dengan target awal hanya 55 % dengan harapan di tahun akhir renstra (2019) menjadi 70%. Sedangkan indikator tujuan yaitu Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan target awal hanya 90 % dengan harapan di tahun akhir renstra menjadi 100%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 s.d 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN (TAHUN)				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mewujudkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.		Prosentase Kualitas kinerja Aparatur yang memiliki kompetensi	55%	57%	60%	65%	70%
	Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan e-planning	90%	90%	100 %	100 %	100 %

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan cara atau langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi. Perumusan strategi lebih bersifat makro. Strategi pada dasarnya dapat dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan oleh masing-masing organisasi.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran SKPK.

Adapun strategi dan kebijakan yang ditempuh Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Strategi : meningkatkan peran dan fungsi Bappeda sebagai lembaga pelaksana kebijakan daerah dibidang perencanaan.

Kebijakan : melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA.			
MISI I : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.	Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja dan teknologi;	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, tertata baik serta mengacu kepada upaya reformasi birokrasi yang telah ditetapkan.

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai langkah lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019 maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda
Kabupaten Pidie Jaya

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2019)	Lokasi
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Mewujudkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.				Prosentase Kualitas kinerja Aparatur yang memiliki kompetensi	50 %	55%	5.293	57%	9.141	60%	8.989	65%	6.832	70%	5.562	70%	35.816	Pidie Jaya	
	Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme			Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan e-planning	80 %	90%	5.293	90%	9.141	100 %	8.989	100 %	6.832	100 %	5.562	100%	35.816	Pidie Jaya	
		1.05.1.06.01.00.15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tingkat kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan RTRW	50 %	60%	40	70%	30	80%	39	85%	51	90%	36	90%	195	Pidie Jaya	
		1.05.1.06.01.00.15.16	Sosialisasi Qanun Tata Ruang	Terlaksananya sosialisasi Qanun Tataruang kabupaten Pidie Jaya	0%	100%	40	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	40	Pidie Jaya	
		1.05.1.06.01.00.15.20	Pengendalian Tata Ruang	Terlaksananya Pengendalian Pembangunan sesuai dengan Tata Ruang wilayah	0%	0%	-	55%	30	60%	39	65%	51	70%	36	70%	155	Pidie Jaya	

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2019)		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1.06.1.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1.395	12 Bulan	1.421	12 Bulan	1.383	12 Bulan	1.481	12 Bulan	1.433	60 Bulan	7.113	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman yang digunakan dan materai yang dibutuhkan	12 Bulan	12 Bulan	6	12 Bulan	5	12 Bulan	6	12 Bulan	7	12 Bulan	6	60 Bulan	29	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah ketersediaan pelayanan Informasi/ Kominikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	179	12 Bulan	222	12 Bulan	179	12 Bulan	236	12 Bulan	345	60 Bulan	1.161	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan untuk operasional kantor	12 Bulan	12 Bulan	201	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	12 bulan	201	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya keperluan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	27	12 Bulan	42	12 Bulan	46	12 Bulan	47	12 Bulan	51	60 Bulan	212	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK yang memadai untuk operasional perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	103	12 Bulan	103	12 Bulan	103	12 Bulan	103	12 Bulan	103	60 Bulan	515	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	39	12 Bulan	39	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	26	60 Bulan	144	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	12 Bulan	12 Bulan	263	12 Bulan	206	12 Bulan	239	12 Bulan	247	12 Bulan	35	60 Bulan	991	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya referensi buku dan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan	5	60 Bulan	25	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur pemerintahan	11 Bulan	11 Bulan	232	11 Bulan	223	11 Bulan	236	11 Bulan	227	11 Bulan	308	55 Bulan	1.226	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	328	12 Bulan	310	12 Bulan	268	12 Bulan	313	12 Bulan	270	60 Bulan	1.489	Pidie Jaya

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2019)		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Luar Daerah															
		1.06.1.06.0 1.00.01.20	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi di dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12 Bulan	12	12 Bulan	15	12 Bulan	10	12 Bulan	16	60 Bulan	64	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.01.29	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	0 Bulan	0 Bulan	-	12 Bulan	254	12 Bulan	267	12 Bulan	267	12 Bulan	268	48 Bulan	1.056	Pidie Jaya
		1.06.1.06. 01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	65%	67%	345	69%	193	71%	1.010	73%	1.171	75%	152	75%	2.870	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya Perlengkapan gedung Kantor	55%	80%	238	100%	124	100%	21	100%	76	100%	25	100%	484	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	60%	80%	72	100%	39	100%	952	100%	21	100%	53	100%	1.138	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Selama 1 (satu) Tahun	100%	100%	35	100%	29	100%	37	100%	68	100%	74	100%	243	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi berat kantor Bappeda	0%	0%	-	0%	-	0%	-	60%	1.006	40%	900	100%	1.906	Pidie Jaya
		1.06.1.06. 01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	74%	-	-	-	-	80%	35	0%	-	0%	-	80%	35	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Setelan Pakaian Dinas yang Tersedia	75 stel	0 stel	-	0 stel	-	75 stel	35	0 stel	-	0 stel	-	75 stel	35	Pidie Jaya

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2019)		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1.06.1.06.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75%	76%	20	77%	40	78%	55	79%	54	80%	60	80%	229	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.05.01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terlaksananya peltihan untuk aparatur perencana	4 Kali	4 Kali	20	8 Kali	40	8 Kali	55	8 Kali	54	8 Kali	60	36 kali	229	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.05.15	Fasilitasi Penyusunan Standar Opearisional Prosedur (SOP)	Tersedianya dokumen SOP Bappeda	0 dok	0 dok	-	0 dok	-	1 dok	22	0 dok	-	0 dok	-	1 Dok	22	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya informasi Kinerja dan Keuangan	100%	-	-	-	-	100%	24	100%	28	100%	52	100%	104	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya laporan dan dokumen anggaran	0 dok	0 dok	-	0 dok	-	4 dok	24	4 dok	28	4 dok	28	12 dok	79	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.06.07	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Terlaksananya pelatihan penyusunan RENSTRA	1 keg	0 keg	-	0 keg	-	0 keg	-	0 keg	-	1 keg	52	1 keg	52	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.15	Program Pengembangan Data dan Informasi	Meningkatnya informasi dan dataepada masyarakat	65%	70%	284	75%	490	80%	1.218	82%	482	85%	428	85%	2.902	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.15.06	Geografis Informasi Sistem (GIS)	Jumlah database spasial yang tersedia	2 database	3 database	47	5 database	96	8 database	906	6 database	166	5 database	110	27 database	1.326	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.15.14	Pusat Data/Informasi (Pusdatin)	Tingkat ketersediaan data/informasi perencanaan	10%	20%	86	30%	88	40%	96	60%	95	80%	108	80%	472	Pidie Jaya

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2019)		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Bappeda Kabupaten Pidie Jaya	pembangunan daerah														
		1.06.1.06.0 1.00.15.15	Penyusunan Profil Kabupaten Pidie Jaya	Jumlah buku profil Pidie Jaya yang tersusun	1 dok	0 dok	-	1 dok	40	0 dok	-	1 dok	36	0 dok	-	1 dok	76	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.15.16	Pengembangan Database Pembangunan Daerah	Jumlah buku pengembangan data base pembangunan daerah	10%	20%	82	20%	183	20%	123	20%	93	20%	108	100%	589	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.15.17	Publikasi Data / Informasi Pembangunan Daerah Melalui Teknologi Informasi	Jumlah publikasi pembangunan daerah melalui website	10 kali	20 kali	26	20 kali	27	20 kali	30	20 kali	29	20 kali	39	100 kali	151	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.15.18	Publikasi Data Statistik Daerah	Jumlah data statistik daerah yang tersedia	18 Dok	12 Dok	43	12 Dok	56	12 Dok	63	12 Dok	63	12 Dok	63	60 dok	288	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.16	Program kerjasama pembangunan	Meningkatnya integrasi pembangunan antar sektor	65%	70%	121	75%	2.631	80%	130	85%	161	87%	119	87%	3.162	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.16.07	Perencanaan Pembagunan dan Pengembangan Khusus	Tersedianya dokumen usulan kegiatan (DAK dan OTSUS)	2 dok	2 dok	40	2 dok	42	2 dok	49	2 dok	76	2 dok	77	10 dok	284	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.16.08	Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pendukung dana dekonstrasi dan tugas perbantuan yang disusun	2 dok	2 dok	48	2 dok	2.526	2 dok	61	2 dok	52	2 dok	42	10 dok	2.729	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.16.12	Fasilitas Kerjasama Pembangunan Regional Manajemen	Jumlah koordinasi dan kerja sama dengan daerah kegiatan RM	0%	20%	32	20%	21	20%	20	0%	-	0%	-	60%	73	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.16.13	Penyusunan Perkembangan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perkembangan pembangunan daerah yang disusun	1 dok	0 dok	-	1 dok	42	0 dok	-	1 dok	34	0 dok	-	2 dok	76	Pidie Jaya

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2019)		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1.06.1.06.01.00.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Diklat Perencanaan	60%	7%	1.203	7%	1.077	10%	945	10%	444	10%	420	44%	4.089	Pidie Jaya
				Prosentase kelembagaan P3A yang dibina dan penguatan Kelembagaan KPI	100%	90%	-	92%	-	93%	-	94%	-	95%	-	95%	-	Pidie Jaya
				Prosentase penguatan kelembagaan sanitasi dan air minum (PPSP/AMPL)	100%	90%	-	92%	-	93%	-	94%	-	95%	-	95%	-	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.20.02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat ketersediaan informasi perencanaan pembangunan daerah	0 kali	0 kali	-	1 kali	26	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	1 kali	26	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.20.05	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	tingkat pelaksanaan Program WISMP Kabupaten Pidie Jaya	50%	100%	99	100%	123	100%	377	100%	237	100%	222	100%	1.059	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.20.06	Operasional Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Air Minum dan AMPL	terlaksananya percepatan sanitasi permukiman (PPSP) dan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	85%	90%	1.059	92%	884	93%	522	94%	160	95%	151	95%	2.776	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.20.07	Peningkatan Kemampuan Teknis Penguasaan Teknologi dan Informasi Aparat	Jumlah aparatuer daerah yang dilatih menggunakan software ArcGIS	10 orang	20 org	44	20 org	45	20 org	46	20 org	47	20 org	47	100 org	229	Pidie Jaya

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2019)		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Perencanaan															
		1.06.1.06.01.00.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	97,25%	815	98%	2.100	100%	2.951	100%	1.533	100%	1.539	100%	8.939	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.21.02	Penyusunan rancangan RPJPD	Jumlah ranc. dokumen RPJPD yang disusun	0 dok	0 dok	-	1 dok	200	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	1 dok	200	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.21.04	Penetapan RPJPD	Jumlah Qanun RPJP yang disahkan	0 qanun	0 qanun	-	0 qanun	-	1 qanun	45	0 qanun	-	0 qanun	-	1 qanun	45	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.21.05	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang disusun	1 dok	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	1 dok	514	1 dok	514	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.21.08	Penyusunan rancangan RKPDP	Jumlah dokumen RKPDP yang disusun	1 dok	1 dok	41	1 dok	80	1 dok	66	1 dok	62	1 dok	66	5 dok	315	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP	terlaksananya Penyelenggaraan musrenbang RKPDP	1 keg	1 keg	172	1 keg	257	1 keg	315	1 keg	283	1 keg	317	5 keg	1.345	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.21.13	Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah buku Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	4 dok	4 dok	153	2 dok	155	2 dok	155	2 dok	157	2 dok	124	12 dok	743	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.21.14	Penyusunan RKT	Jumlah dokumen RKT yang disusun	1 dok	2 dok	16	2 dok	28	2 dok	22	1 dok	24	1 dok	26	8 dok	116	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.21.15	Penyusunan KU-APBK	Jumlah dokumen KU-APBK yang disusun	1 dok	1 dok	31	1 dok	36	1 dok	39	1 dok	34	1 dok	34	5 dok	174	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.21.17	Penyusunan PPAS	Jumlah dokumen PPAS yang disusun	1 dok	1 dok	32	1 dok	42	1 dok	40	1 dok	35	1 dok	34	5 dok	183	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.21.19	Penyusunan PPAS Perubahan	Jumlah dokumen PPAS Perubahan yang disusun	1 dok	1 dok	13	1 dok	23	1 dok	31	1 dok	27	1 dok	31	5 dok	126	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.21.20	Penyusunan KU-APBK Perubahan	Jumlah buku dokumen KU-APBK Perubahan yang tersedia	1 dok	1 dok	13	1 dok	26	1 dok	29	1 dok	25	1 dok	28	5 dok	120	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.21.21	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RPI2JM yang dilakukan Review	0 dok	1 dok	272	1 dok	96	1 dok	104	1 dok	139	1 dok	113	5 dok	724	Pidie Jaya

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2019)		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Rencana terpadu dan program investasi infrastruktur Jangka Menengah (RP12JM)															
		1.06.1.06.0 1.00.21.24	Evaluasi RPJMD Pidie Jaya	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJM Kabupaten Pidie Jaya	1 dok	0 dok	-	1 dok	141	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	1 dok	141	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.21.26	Sosialisasi Dokumen RPJMD Pidie Jaya Thn 2014 - 2019	prosentase sosialisasi yang dilaksanakan	0 keg	1 keg	8	0 keg	-	0 keg	-	0 keg	-	0 keg	-	1 keg	8	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.21.28	Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah	Prosentase Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah	1 dok	1 dok	63	3 dok	913	2 dok	789	1 dok	26	1 dok	27	8 dok	1.817	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.21.29	Koordinasi, Transparansi dan Percepatan Realisasi Anggaran	Jumlah laporan elektronik dan dokumen evaluasi serta pengawasan pelaksanaan anggaran pembangunan daerah	1 dok	0 dok	-	1 dok	104	1 dok	132	1 dok	102	1 dok	104	4 dok	443	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.21.30	Penyusunan Perubahan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJM Perubahan yang disahkan	0 dok	0 dok	-	0 dok	-	1 dok	204	0 dok	-	0 dok	-	1 dok	204	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.21.31	Penyusunan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD Perubahan yang tersedia	0 dok	0 dok	-	0 dok	-	1 dok	25	1 dok	24	1 dok	28	3 dok	77	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.21.32	Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik	Terlaksananya proses perencanaan berbasis aplikasi e-planning	tidak	tidak	-	tidak	-	ada	956	ada	345	ada	94	ada	1.395	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.21.33	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	Tersusunnya rancangan reknokratik RPJMD	0 dok	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	1 dok	190	0 dok	-	1 dok	190	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.21.34	Penetapan Perubahan RPJMD	Jumlah Qanun Perubahan RPJMD yang	0 qanun	0 qanun	-	0 qanun	-	0 qanun	-	1 qanun	60	0 qanun	-	1 qanun	60	Pidie Jaya

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2019)		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				disahkan														
		1.06.1.06.01.00.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan ekonomi	100%	95%	331	97%	365	100%	540	100%	430	100%	466	100%	2.131	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.22.02	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Jumlah Dokumen PDRB yang disusun	1 dok	1 dok	6	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	1 dok	6	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi	1 dok	1 dok	167	1 dok	235	2 dok	378	1 dok	205	1 dok	220	6 dok	1.205	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.22.04	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Tingkat koordinasi bidang perencanaan ekonomi yang dilaksanakan	100%	100%	102	100%	87	100%	58	100%	123	100%	119	100%	489	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.22.12	Promosi Potensi Pembangunan Ekonomi Daerah	Terlaksananya promosi potensi ekonomi daerah	1 kali	1 kali	56	1 kali	42	1 kali	104	1 kali	102	1 kali	127	5 kali	430	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan KSDM	100%	100%	290	100%	347	100%	288	100%	521	100%	518	100%	1.964	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.23.03	Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Tingkat pelaksanaan koordinasi bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	100%	100%	139	100%	139	100%	123	100%	145	100%	106	100%	652	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.23.08	Koordinasi Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	0 dok	1 dok	54	1 dok	58	1 dok	50	1 dok	256	1 dok	363	5 dok	781	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.23.11	Koordinasi Pelaksana Program MDGs	Tingkat pelaksanaan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pencapaian MDG's Pidie	50%	100%	19	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	19	Pidie Jaya

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2019)		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jaya														
		1.06.1.06.0 1.00.23.12	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Gampong	Prosentase Fasilitasi Percepatan Pembangunan Gampong	0%	20%	78	35%	109	25%	92	20%	89	0%	-	100%	369	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.23.15	Pelaksanaan Program SDGS	Prosentase Efektifitas Koordinasi Pelaksanaan SDGS	0%	0%	-	0%	-	100%	22	100%	31	100%	50	100%	103	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.23.16	Penyusunan Indikator Pendidikan Daerah	Jumlah Dokumen Indikator Pendidikan Daerah yang Tersusun	0 dok	0 dok	-	1 dok	41	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	1 dok	41	Pidie Jaya
		1.06.1.06.01.00.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan Sarana dan Prasarana	100%	100%	450	100%	447	100%	371	100%	478	100%	337	100%	2.083	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.24.04	Koordinasi Perencanaan Pembagunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya	tingkat pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya	100%	100%	52	100%	71	100%	53	100%	108	100%	98	100%	383	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.24.05	Pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	tingkat Pemanfaatan Lahan kritis menjadi lahan produktif	5%	7%	398	7%	376	7%	318	3%	151	2%	139	26%	1.382	Pidie Jaya
		1.06.1.06.0 1.00.24.06	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	Tersedianya dokumen KLHS untuk penyusunan RPJMD	0 dok	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	1 dok draf	218	1 dok	100	1 Dok	318	Pidie Jaya

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penggunaan indikator kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya. Indikator kinerja secara langsung menunjukkan cita-cita yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMK dapat dilihat dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMK (2014)	Target Capaian Per Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMK
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase ketersediaan dokumen LAKIP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Proses perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi E-Planning	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %	100 %	100 %
4.	Jumlah Dokumen data dan informasi Pembangunan daerah yang tersedia	10 Buku/dok	10 Buku/dok	10 Buku/dok	10 Buku/dok	10 Buku/dok	10 Buku/dok	50 Buku/dok
5.	Pertumbuhan PDRB per tahun / Pertumbuhan Ekonomi	4-5 %	4,87 %	3,71 %	4,11 %	4,23 %	4,52 %	4,52 %
6.	PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (jutaan)	Rp. 5,17	Rp. 14,66	Rp. 14,68	Rp. 18,14	Rp. 19,72	Rp. 20,14	Rp. 20,14
7.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	24,35 %	23,10 %	22,05 %	21,00 %	19,95 %	19,95 %	19,95 %

BAB VIII

PENUTUP

Selaku lembaga teknis atau OPD yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dituntut untuk berperan aktif dalam pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bappeda memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan sesuai dengan RPJMK Pidie Jaya 2014 s.d 2019 yang memuat Visi dan Misi Bupati terpilih.

Sesuai dengan fungsinya yang strategis tersebut, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya terus berupaya membangun koordinasi antar sektor guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Menyiapkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas serta aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagaimana mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Dengan 3 (tiga) fungsi perencanaan utama yang meliputi bidang: Perencanaan Pembangunan Ekonomi (P2EK), Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia (P2KSDM), Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP), serta ditambah dengan 1 fungsi atau bidang Pengendalian Penelitian dan Evaluasi Pembangunan (P2EP) dan Sekretariat, maka Bappeda mengawal proses pembangunan dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan proses pelaksanaan pembangunan.

Di samping tugas dan fungsi mengawal dan mengendalikan proses pembangunan, Bappeda juga bertanggungjawab untuk menyiapkan dokumen-dokumen penting perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPK, RPJMK, RKPK, RTRW, KU-APBK dan PPAS sebagai dokumen dasar disamping dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang menjadi acuan dalam menyusun perencanaan lintas sektor.

Semua tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Bappeda serta langkah-langkah strategis yang menjadi cita-cita dan harapan yang dilakukan Bappeda selama 5 (lima) tahun telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Tahun 2014 s.d 2019 ini. Semoga Renstra Bappeda dapat menjadi pedoman internal dalam proses perencanaan daerah yang dapat dipedomani oleh

masing-masing bidang perencanaan. Serta Renstra Bappeda diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga teknis lainnya dalam menyusun perencanaan sektoral sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS